

PASTIKAN JAMINAN SOSIAL WARGA MISKIN MAKIN KOMPLET

Tahun Ini, Pemkab Anggarkan Rp 12,3 M untuk JPS

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Kustini memastikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Sleman komplet. Hal itu sebagai bentuk fasilitasi program perlindungan sosial sebagai strategi kebijakan publik untuk memerangi kemiskinan dan meringankan penderitaan kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.

"Tahun ini kami telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dan itu komplet mulai kesehatan, pendidikan dan sosial. Termasuk di dalamnya ada untuk pelatihan dan sebagainya," ungkap

Bupati saat dikonfirmasi, Rabu (25/1).

Menurut Bupati, untuk tahun 2023 ini Pemkab Sleman menganggarkan dana sebesar Rp 12,3 miliar untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program JPS merupakan program yang disedi-



KR-Istimewa

Bupati Sleman Kustini

akan untuk membantu masyarakat miskin maupun rentan miskin di bidang sosial,

kesehatan dan pendidikan.

"Selain JPS, kami menganggarkan lebih dari Rp 18 miliar bantuan sosial untuk yatim piatu, disabilitas, lanjut usia telantar, lembaga kesejahteraan sosial, korban bencana, korban bantuan sosial dan lainnya," bebarnya.

Di samping itu, langkah memutuskan mata rantai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sleman telah dimulai dengan melakukan pendataan data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dari pendataan tersebut berguna untuk memetakan jenjang kemiskinan di

masing-masing daerah. Pemerintah juga aktif memberikan edukasi maupun layanan pemberdayaan masyarakat kurang mampu hingga lansia.

"Seperti program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) dari Kementerian Sosial yang berupa bimbingan pelatihan dan sarana prasarana usaha bagi warga miskin yang berminat diantarkan. Serta berbagai bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi masyarakat miskin," jelas Bupati.

Ditambahkan, berdasarkan data dari BPS angka kemis-

kinan di Sleman pada tahun 2022 turun menjadi 7,47 persen atau sekitar 91.826 orang.

"Kami juga akan membantu masyarakat untuk yang mau berkarya. Yang minat dengan UMKM nanti kami dampingi. Yang minat pertanian nanti akan kami sediakan tanah kas desa juga. Dan tahun ini (2023), kami menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 2 persen dari angka sebelumnya. Dan kita anggar Rp 7 miliar untuk menuntaskan kemiskinan untuk mencapai target itu," pungkask Bupati. (Has)-f

HANYA BERTUGAS 6 - 15 FEBRUARI

KPU Sleman Buka Pendaftaran Pantarlih

SLEMAN (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman mulai Kamis (26/1) hari ini membuka pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Tugas Pantarlih ini untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di Kabupaten Sleman.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menjelaskan, pendaftaran Pantarlih ini mulai 26 Januari 2023. Kemudian penerimaan pendaftaran sampai 31 Januari 2023 di masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sedangkan penelitian administrasi mulai 27 Januari sampai 2 Februari 2023. "Untuk pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih sampai 3-5 Februari 2023. Kemudian penetapannya 5 Februari 2023," jelasnya di kantor KPU Sleman, Rabu (25/1).

Setelah penetapan, KPU Sleman akan langsung melakukan pelantikan Pantarlih pada 6 Februari 2023. Selanjutnya Pantarlih akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih sampai 15

Maret 2023. "Masa kerja Pantarlih ini hanya 6 Februari sampai 15 Februari 2023," terangnya.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sleman Aswino Wardana SIP menambahkan, Pantarlih ini nantinya akan melakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) di tingkat TPS. Hasil pencocokan dan penelitian tersebut, rencananya menjadi Data Pemilih Sementara (DPS). "Hasil pencocokan dan penelitian akan jadi DPS," tandasnya.

Setelah masa kerja Pantarlih berakhir, Aswino berharap nanti bisa menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mengingat Pantarlih sudah mengetahui calon pemilih yang berada di TPS. "Kami berharap Pantarlih ini diproyeksikan menjadi KPPS. Soalnya mereka sudah tahu siapa saja yang masuk dalam DPT," tuturnya. (Sni)-f

AKOMODIR PENDAFTAR PEREMPUAN

Rekrutmen Panwaslu Kalurahan Diperpanjang

SLEMAN (KR) - Untuk memenuhi kuota pendaftar, terutama pendaftar perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Sleman pada Pemilu Serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sleman memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran PKD sampai 26 Januari 2023. Perpanjangan ini hanya di beberapa kalurahan saja.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sleman Vici Herawati mengungkapkan, perpanjangan pendaftaran PKD ini tidak terjadi di semua kapanewon atau kalurahan. Namun hanya di kecamatan atau desa tertentu saja.

"Untuk memenuhi kota pendaftar, baik pendaftar laki-laki dan

terutama pendaftar perempuan, pendaftaran PKD di Kabupaten Sleman diperpanjang, namun tentu saja tidak di semua kapanewon dan kalurahan. Perpanjangan pendaftaran sampai 26 Januari besok," jelasnya, Rabu (25/1).

Perpanjangan yang terbuka untuk pendaftar laki-laki dan perempuan terjadi di Kalurahan Sariharjo dan Donoharjo Kapanewon Ngaglik, Kalurahan Banyurejo dan Mororejo Kapanewon Tempel, Kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem, Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir, dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati.

Sedangkan untuk perpanjangan pendaftaran yang hanya dibuka untuk perempuan terjadi di Kalurahan Purwobinangun, Harjo-

binangun dan Candibinangun Kapanewon Pakem, Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati, Kalurahan Sumberarum, Sumberahayu, dan Sumbarsari Kapanewon Moyudan, Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi, serta Kalurahan Gayamharjo dan Sambirejo Kapanewon Prambanan. "Jadi perpanjangan itu ada yang pendaftaran laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga yang hanya untuk pendaftar perempuan saja," sambungnya.

Vici menambahkan, untuk informasi lebih detail tentang perpanjangan pendaftaran ini, masyarakat dapat datang langsung ke Kantor Panwaslu Kecamatan setempat. "Kalau ingin lebih jelas, bisa datang ke kantor panwaslu kecamatan," pungkasknya. (Sni)-f

GATHERING FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TJSP)

Bersinergi dan Memberi Manfaat untuk Warga Sleman

MENGAWALI tahun 2023, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Sleman menggelar gathering di Omah Kecebon Mlati, Rabu (25/1). Gathering diikuti 49 perwakilan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman.

Menurut Wakil Ketua Forum TJSP Sleman Muhammad Sigit, acara tersebut dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan fasilitasi Sekretariat Forum TJSP Kabupaten Sleman agar proses perencanaan dan pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan yang ada dan tergabung ke dalam anggota Forum TJSP di Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan sinergis. "Harapannya agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan di Sleman," ujarnya.

Disebutkan, ada 3 agenda utama dalam Gathering TJSP. Yang pertama, berharap untuk semua saling atau lebih mengenal satu sama lain agar koordinasi dan kerja sama ke depan dapat ditingkatkan. Yang kedua, untuk momen penyampaian materi tentang TJSP atau yang lebih dikenal Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat banyak perusahaan yang mungkin belum mengetahui secara persis tentang TJSP di kabupaten Sleman.

"Yang ketiga, sebagai tahap pra musyawarah perencanaan TJSP tahun 2024. Banyak perusahaan yang merencanakan pelaksanaan program setahun ke depan di awal



KR-Istimewa

Peserta gathering Forum TJSP Sleman foto bersama.

awal tahun. Oleh karena itu kami menyelenggarakan gathering ini sebagai pra musren TJSP sehingga diharapkan nanti saat dilaksanakan musren TJSP, semua sudah lebih siap dan jelas untuk berpartisipasi seperti apa dan bagaimana," kata Sigit.

Pada gathering tersebut diundang 106 perusahaan dimana mayoritas perusahaan yang diundang sudah bergabung sebagai anggota forum TJSP, dan sebagian

ada perusahaan yang diundang tapi belum tergabung ke dalam Forum TJSP Kabupaten Sleman seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Grab, Mataram Surya Visi Sinema dan beberapa perusahaan lain. Sehingga melalui gathering tersebut dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antar pemerintah daerah selaku sekretariat Forum TJSP, pengurus Forum TJSP dengan Bapak Ibu semua perwakilan dari perusahaan-pe-

rusahaan yang ada di kabupaten Sleman.

"Dalam gathering juga disampaikan paparan mengenai kewajiban perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman untuk menjadi anggota Forum TJSP Sleman, sesuai dengan amanat Perda No 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Untuk itu, merupakan kewajiban pula bagi kami, pemerintah daerah yang diwakili oleh Sekretariat

Forum TJSP untuk menyampaikan hal tersebut. Di samping itu, disampaikan pula hal-hal teknis dan yang terkait dengan hak dan kewajiban perusahaan dalam bidang CSR," beber Sigit yang juga menjabat Dirut Bank Sleman ini.

Diungkapkan pula, jumlah realisasi anggaran TJSP perusahaan dari tahun ke tahun meningkat. Rinciannya tahun 2019 jumlah total anggaran mencapai Rp 6.786.268.480 dengan 24 perusahaan pelaksana dan 151 kegiatan. Tahun 2020 total realisasi TJSP hanya mencapai Rp 7.173.642.216 dengan 22 perusahaan pelaksana dan 191 kegiatan. Tahun 2021 realisasi TJSP mencapai Rp 10.164.910.139 yang dilaksanakan oleh 45 perusahaan dengan 201 kegiatan. Tahun 2022 realisasi TJSP dari 67 perusahaan adalah sebesar Rp 12.322.257.773,- dengan jumlah total 590 kegiatan

"Meski terkena Covid di tahun 2020 sampai tahun 2022, ternyata malah banyak perusahaan yang menunjukkan kepeduliannya kepada sesama. Rata-rata peningkatan realisasi anggaran TJSP mencapai 23%, hal ini merupakan hal yang sangat menggembirakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman semakin kuat dan berkembang, serta mampu memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat di Kabupaten Sleman," pungkask Sigit. (Has)-f



KR-Istimewa

Muhammad Sigit memberi arahan anggota TJSP.



KR-Istimewa

Penyerahan kartu anggota TJSP.



KR-Istimewa

Keakraban peserta gathering forum TJSP.